

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
SEBELUM DAN SELAMA PANDEMIK COVID-19 PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh :

IMANIA WIGGA PRATIWI

160810129

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2021

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
SEBELUM DAN SELAMA PANDEMIK COVID-19 PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh :

IMANIA WIGGA PRATIWI

160810129

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : IMANIA WIGGA PRATIWI

NPM : 160810129

Fakultas : Ilmu sosial dan humaniora

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa ""Skripsi"" yang saya buat dengan judul:

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 27 Januari 2021


Imania Wigga Pratiwi
NPM. 160810129

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
SEBELUM DAN SELAMA PANDEMIK COVID-19 PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh :
IMANIA WIGGA PRATIWI
160810129**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 04 Maret 2021



Argo Putra Prima, S.E., M.Ak

Pembimbing

ABSTRAK

Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi Covid-19, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama Covid- 19 serta strategi kebijakan pemerintah dalam pencapaian target perpajakan kendaraan bermotor. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data empiris dan pemahaman yang komprehensif tentang esensi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan langsung. Analisis data dilakukan selama pengumpulan data. Teknik analisis digunakan secara interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan kendaraan bermotor sangat penting guna meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah juga perlu menjadikan wajib pajak menjadi wajib pajak untuk mencapai target penerimaan PAJAK. Pemahaman penelitian peraturan perpajakan ,target realisasi pajak dan upaya pemerintah merupakan tugas kita semua dalam hal pengupayaan pendapatan pajak . Objek yang kita teliti disini yakni kendaraan bermotor . Kepatuhan wajib pajak bermotor disini dipengaruhi oleh faktor pengetahuan,kesadaran,dan moralitas pajak. Tingkat kepatuhan yang masih rendah karena peningkatan jumlah kendaraan tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan pajaknya.Pandemik ini juga membawa dampak pada penurunan penerimaan PKB dan BNN baik untuk kota batam maupun di provinsi Kepulauan Riau. BPPD sudah mengupayakan berbagai di antaranya adalah gencarnya sosialisasi di berbagai media,penghapusan denda pajak,memperbaiki layanan dan inisiasi e-samsat.Perlu diupayan lagi dalam hal penerimaan pajak ini.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

This researcher aims to analyze motor vehicle taxpayer compliance before and during the Covid-19 pandemic, factors that can affect motor vehicle taxpayer compliance, realization of motor vehicle tax revenue before and during Covid-19 and government policy strategies in achieving vehicle taxation targets. motorized. This research is used to obtain empirical data and a comprehensive understanding of the essence of taxpayer compliance. This study uses a qualitative method. Data collection was carried out through direct field observations. Data analysis was performed during data collection. The analysis technique is used interactively. The results of this study indicate that the level of compliance with motorized vehicles is very important in order to increase regional income. The government also needs to make taxpayers a taxpayer to achieve the target of TAX revenue. Understanding tax regulation research, tax realization targets and government efforts is the duty of all of us in terms of seeking tax revenue. The object we are examining here is motorized vehicles. Motorized taxpayer compliance here is influenced by factors of knowledge, awareness, and tax morality. The level of compliance is still low because the increase in the number of vehicles is not accompanied by an increase in tax revenue. This pandemic also has an impact on decreasing PKB and BNN revenues both for Batam City and in the Riau Islands province. BPPD has made various efforts, including the incessant socialization in various media, the elimination of tax fines, improving services and the initiation of e-Samsat. It is necessary to do more in terms of this tax revenue.

Keywords: *Taxpayer Compliance Motor Vehicle*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala Keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Hendri Herman, S.E. Msi. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
4. Bapak Argo Putra Prima, S.E., M.Ak. selaku pembimbing skripsi pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam yang sangat banyak membantu dan begitu sabar mengarahkan penulis.
5. Kepada seluruh dosen Universitas Putera Batam khususnya program studi Akuntansi yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Rumusan Masalah.....	4
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	5
1.6.1 Manfaat Teoritis	5
1.6.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	7
2.1.2 Pengetahuan Perpajakan	7
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Desain Penelitian	15
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	16
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	16
3.3.1 Data sekunder.....	16
3.3.2 Teknik Wawancara	16
3.4 Metode Analisis Data.....	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	19
4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	19
4.1.1. Faktor Kesadaran Masyarakat.....	19
4.1.2. Faktor Pengetahuan tentang Pajak	20
4.1.3. Faktor Moral Wajib Pajak.....	20
4.3Strategi dan Kebijakan Pemerintahan dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23
4.4Upaya Pemerintah Provinsi Kep. Riau dalam Memotivasi Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	26
4.5 Pembahasan.....	27
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	29
5.1 Simpulan	29
5.2 Saran	29
DAFTAR PUTAKA	30
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	14
Gambar 3.1 Alur Penelitian Awal-Akhir.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Realisasi PKB Dispenda Kota Batam	22
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sector minyak dan gas yang menjadi tumpuan utama pemerintah pada tahun 1970-an hingga awal 1980-an tidak bisa lagi menjadi pemain penting dalam pendapatan Negara seiring pesatnya pertumbuhan penduduk dan sifat dari minyak dan gas yang tidak bisa diperbaharui. Pemerintah pun mencari alternative lain yang dinilai lebih aman, yaitu pajak. Pajak terbukti memegang jajaran peran utama dalam pembangunan nasional yang berhilir pada kesejahteraan rakyat karena menduduki 70% hingga 80% dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, peningkatan penerimaan pajak menjadi pekerjaan rumah yang vital bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Jika pajak diklasifikasikan menurut pemungut dan pengelola, dapat kita temui dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Instansi yang terlibat disini adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Provinsi Kepulauan Riau, Kepolisian Republik Indonesia dan Asuransi Jasa Raharja. Pajak Kendaraan

Bermotor memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak sehingga sangat penting untuk dioptimalkan dengan cara meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak (WP).

Tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak bisa kita abaikan dalam pembahasan ini. Mardiasmo (2016:7) menjabarkan pengetahuan perpajakan sebagai apapun yang diketahui dan dipahami dari hukum pajak materiil dan pajak formil. Pengetahuan yang mumpuni akan pajak akan meminimalisir timbulnya *tax evasion*. Pernyataan pendukung atas hal ini juga terdapat dalam Paramartha dan Rasmini (2016) bahwa pengetahuan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Akuntabilitas pelayanan fiskus dari Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi faktor kunci selanjutnya. Dalam teori atribusi dijabarkan bahwa komponen luar yang memiliki pengaruh pada persepsi Wajib Pajak adalah kualitas dari pelayanan. Pelayanan yang berkualitas terbukti berpengaruh positif pada level patuh untuk membayar pajak. Tentu ini dipicu oleh rasa senang karena terlayani dengan baik. Paramartha dan Rasmini (2016) menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan dipengaruhi secara positif oleh kualitas dari layanan.

Kesadaran turut memiliki peran penting. Kesadaran Wajib Pajak berarti situasi tau, sanggup, dan mau mengerjakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Komponen dari kesadaran Wajib Pajak sendiri adalah persepsi positif akan pajak dan peningkatan pengetahuan pajak. Wajib Pajak dengan kesadaran rendah cenderung abai dan melanggar peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan satu

fenomena dimana masyarakat yang abai mengandalkan kebijakan pemutihan denda. Hal ini tentu mendegradasi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Penelitian Megawangi dan Setiawan (2017) mendukung pernyataan ini, bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan dipengaruhi komponen kesadaran Wajib Pajak.

Pemerintah mengandalkan langkah sosialisasi untuk mengatasi hal ini. Terobosan sosialisasi yang dilakukan adalah iklan digital di berbagai media social dalam berbagai format yang interaktif. Model sosialisasi ini diharapkan memudahkan masyarakat untuk paham akan faedah pajak terlebih sanksi bagi yang melanggar.

Fenomena penghindaran pajak tersebut menjadi sinyal bahwa ada faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak yang tidak berjalan sehingga memilih abai pada kewajibannya. Sinyal ini dapat dijadikan prioritas kajian guna optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. Terlebih, pemerintah sudah mengeluarkan banyak peraturan mengenai pajak namun masih saja banyak pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak. Fenomena yang terjadi di Kota Batam, puluhan kendaraan ditahan oleh instansi yang berwenang tiap razia digelar karena terbukti memiliki pajak terutang bahkan hingga beberapa tahun.

Berdasarkan penjabaran akan pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor dan penggambaran fenomena mengenai pajak tersebut di Kota Batam, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada Dinas Pendapatan Kota Batam”.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat peneliti identifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi terjadinya penurunan penerimaan pajak selama Covid-19 pada Dinas Pendapatan Kota Batam.
2. Mengetahui jumlah dan pemasukan target kendaraan bermotor tahun sebelum pandemi dan selama pandemi periode Januari-Desember 2020 karena selama pandemi ini banyak masyarakat yang menunggak tidak membayar pajak kendaraan nya dengan berbagai faktor.
3. Langkah dan strategi yang diambil pemerintah untuk mencapai target realisasi pajak kendaraan bermotor yang belum efektif dilakukan.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan dalam kepatuhan perpajakan ini maka peneliti akan memberikan batasan agar tidak menyimpang memberikan informasi serta dapat dimengerti dan dipahami untuk peneliti selanjutnya.

1. Faktor-faktor kepatuhan kendaraan bermotor.
2. Realisasi penerimaan pajak dari sebelum pandemi hingga saat ini.
3. Strategi dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang , identifikasi masalah , dan batasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan seperti berikut :

1. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
2. Bagaimana Realisasi penerimaan pajak kendaraan pajak bermotor sebelum dan selama covid-19 ?
3. Bagaimana Strategi dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target perpajakan kendaraan bermotor ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama Covid-19 karena dimasa pandemi ini banyak para pengendara yang menunggak dalam pembayaran pajak. Strategi dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target perpajakan kendaraan bermotor pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan juga bahan pertimbangan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian di bidang dan objek yang sama.

1.6.2 Manfaat Praktis.

1. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengimplementasikan kemampuan dan ilmu yang di dapat selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
2. Bagi pemerintah dapat memberikan indikator-indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, serta dapat digunakan untuk memberi masukan kepada Dispenda Kota Batam untuk meningkatkan pendapatan target penerimaan pajak kendaraan bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Ilhamsyah *et al.*, (2016) menjabarkan pajak sebagai pemungutan negara pada rakyat didasari Undang-Undang yang sifatnya memaksa, terutang, tanpa imbalan langsung, dan peruntukan penyelenggaraan pemerintahan. Sedang kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban pajak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Parera dan Teguh (2017) menjabarkan pengetahuan perpajakan sebagai kompetensi Wajib Pajak akan peraturan perpajakan, manfaat, serta sanksi jika absen menjalankannya. Ngadiman dan Daniel Husein (2015) menjabarkan sanksi sebagai hukuman atas pelanggaran sebuah peraturan.

seseorang agar melakukan segala sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

2.1.2 Pengetahuan Perpajakan

Berus, Yenuita, dan Kamaliah (2016) menjabarkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai kesediaan Wajib Pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang diukur dari faktor waktu membayar, tariff, pengenaan sanksi, pelayanan, kesadaran, serta pemahaman.

2.1.3 Sosialisasi Perpajakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memaparkan sosialisasi sebagai adalah langkah memasyarakatkan sesuatu hingga dikenal, dipahami, dan dihayati. Ihsan dan Wike dalam Candra (2016) menjabarkan sosialisasi perpajakan sebagai proses edukasi system perpajakan dari pemerintah dalam rangka peningkatan pengetahuan Wajib Pajak.

Menurut Ananda *et al.* (2015:3), sosialisasi perpajakan merupakan program pembinaan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak. Winerungan (2016) memaparkan publikasi, kegiatan, pemberitaan, dan keterlibatan sebagai empat strategi sosialisasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan teori analisis dengan sosialisasi pengorganisasian, sosialisasi media, dan manfaat sosialisasi bertindak sebagai indikator.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kesadaran sebagai keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran adalah kondisi dimana seseorang tahu dan mengerti, sesuai hal tersebut dapat diartikan bahwa kesadaran setiap Wajib Pajak ialah suatu keadaan yang harus Wajib Pajak ketahui serta mengerti akan besarnya manfaat pajak untuk pembiayaan pembangunan dan merupakan sumber pendapatan negara akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak (Fitria, 2017).

2.2 Undang-Undang Mengenai Kendaraan Bermotor

2.2.1. Undang-Undang Tahun nomor 28 tahun 2009

Pajak kendararaan bermotor merupakan pajak dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor berarti semua kendaraan yang

digerakkan oleh peralatan teknik pengubah energi, lengkap dengan roda beserta gandengan, digunakan di darat dan air, termasuk juga di dalamnya alat-alat besar dan berat tanpa roda dan motor yang bersifat permanen.

2.2.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999

Pasal 1 (1) membagi pajak daerah tingkat satu menjadi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015

Pasal 67 (4) UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengatur kebijakan system administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) untuk kendaraan bermotor. Kegiatan yang terkoordinasi dalam system tersebut adalah registrasi, identifikasi, jumlah pajak, dan sumbangan dana kecelakaan lalu lintas yang sifatnya wajib.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pasal 74 (1) menjabarkan penjelasan bahwa kendaraan bermotor dapat dibatalkan pendaftarannya jika permintaan pemilik kendaraan bermotor atau adanya usulan pejabat bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan umum, dan kendaraan umum yang sudah tidak berfungsi.

2.3 Teori dari Buku yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Lalu lintas dan angkutan jalan, Diva Press Group, 124, 126, 128, 130, Tahun 2019, Redaksi Laksana.

2.3.2 How to be a Smarter Taxpayer, Grasindo, 504, Gatot S.M , Faisal.

2.3.3 Pelajaran Ekonomi, Prishardoyo M.Si., Agus Trimarwanto S. Pd., dan Shodiqin S. Pd.

2.4 Fokus tentang Kebijakan Pemerintah dalam Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.1 Memberikan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak.

2.4.2 Menerbitkan Pergub tentang pembebasan sanksi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengendara hanya difokuskan pada beban pokoknya saja.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai metode mengevaluasi jumlah suatu Harga Saham yang berkisar di bursa di antaranya :

1. Penelitian (Ratnasari, 2019) dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017 : Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah”.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang menjadi indikator pemenuhan kewajiban masih sangat rendah terbukti dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diiringi dengan peningkatan penerimaan PKB.

2. Kebijakan Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah digunakan sebagai insentif untuk penyegeraan pelunasan pajak.
 3. Faktor kesadaran masyarakat, tingkat kewajiban moral Wajib Pajak, dan pengetahuan pajak disebutkan sebagai faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan pelunasan pajak.
2. Penelitian (I Made Adi Darma Putra, 2017) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Tabanan”.

Kesimpulan sebagai berikut:

Kesadaran Wajib Pajak, kewajiban moral, pengetahuan, dan persepsi tentang sanksi memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Tabanan.

3. Penelitian (Danarsi, 2017) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Mobil dengan Diberlakukannya Pajak Progresif di Kota Surakarta”.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tidak adanya pengaruh pemahaman dan kesadaran pada kepatuhan pajak setelah penerapan pajak progresif.
- b. Ada pengaruh antara tarif pajak, kualitas layanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan pembayaran pajak mobil setelah penerapan pajak progresif.

4. Penelitian (Vanisa Meifari, 2017) berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating di Kota Tanjung Pinang”.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara pengetahuan, layanan fiskus, kesadaran terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk sosialisasi perpajakan sendiri hanya memoderasi hubungan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak namun tidak memoderasi hubungan layanan fiskus dan kesadaran pada tingkat kepatuhan.

5. Penelitian (Asrofi Langgeng Noerman Syah, 2017) berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes)”.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan, sanksi, dan besar penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sementara pengetahuan dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

6. Penelitian (Erliyana Fitrayanti, 2018) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Rumbai”.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sikap rasional dan persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat di Samsat Rumbai secara simultan.

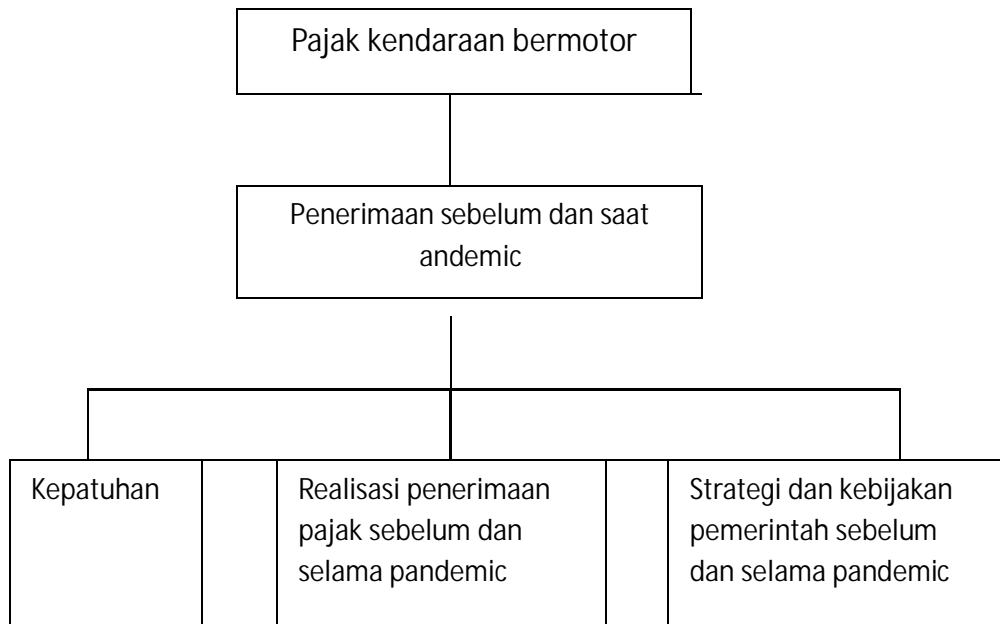
7. Penelitian (Dian Efriyenty, 2019) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam”.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan dengan bukti nilai t hitung = 2,755 yang lebih besar dari t tabel = 1,660 dan berada pada angka signifikansi 0,007.
- b. Nilai t hitung = 3,499 lebih besar dari nilai t tabel = 1,660 dengan nilai signifikansi = 0,001 menjadi bukti bahwa pemahaman memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
- c. Nilai F hitung = 8,702 lebih besar dari nilai F tabel = 2,699 dengan nilai signifikansi 0,000 menjadi bukti bahwa sanksi dan pemahaman bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

2.6 Kerangka Penelitian

Berikut adalah kerangka penelitian berdasar pada pemaparan di atas :



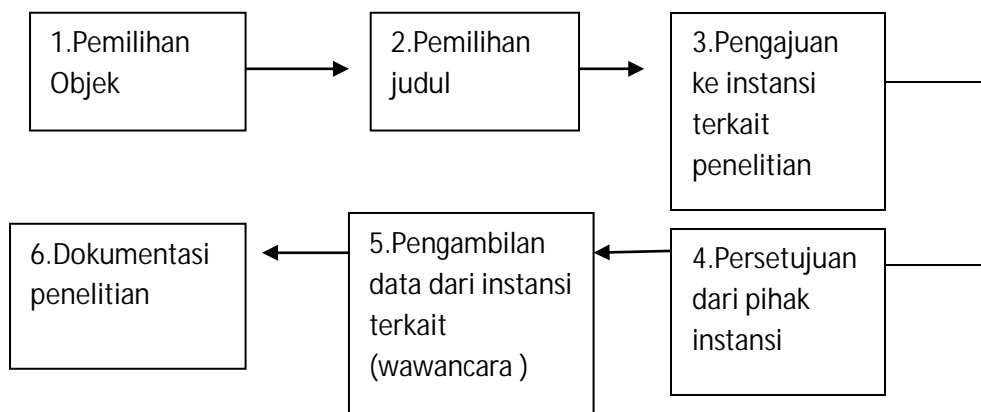
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Target pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Kota Batam bertindak sebagai subjek penelitian ini. Adapun objek penelitiannya yaitu :

1. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor terkait kebijakan penghapusan denda pajak pada Surat Keputusan Gubernur No. 44 Tahun 2017.
2. Pencapaian target sebelum dan selama pandemi Covid-19.
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memotivasi masyarakat untuk membayar PKB.



Gambar 3.1 Alur Penelitian Awal-Akhir

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini yakni Dinas Pendapatan Kota Batam dimana tempat tersebut induk dari tempat penerimaan hasil dari PKB. Waktu pengambilan data penelitian ini dari tahun 2019-2020 dan saat ini (sebelum dan selama covid-19).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mengandalkan pengumpulan data dengan teknik seperti berikut :

1. Studi pustaka, digunakan untuk dasar teori dan pendapat ahli yang dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, dan media.
2. Observasi difokuskan untuk mengumpulkan data primer dengan mengamati secara langsung.
3. Wawancara diperuntukan bagi penggalian informasi yang bersumbangsih pada kepadanan hasil observasi.

3.3.1 Data sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti berikut :

1. Rekapitulasi Penerimaan kendaraan baru se-kepulauan riau tahun 2019-2020 (sebelum dan selama pandemi Covid-19). Tabel terlampir.
2. Data dan realisasi masing-masing KPPD/KUPTD se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 pokok pajak kendaraan berdasarkan laporan. Tabel terlampir.

3.3.2 Teknik Wawancara

1. Pembayaran

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan Kepala Bagian Dinas

Pendapatan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2019 saja kurang lebih

70% merasa sibuk ditambah tidak ada biaya karena terdampak Covid-19 ini, sehingga jauh sekali dari target.

2. Tunggakan

Informan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah menjabarkan bahwa terdapat penunggakan pembayaran atas ribuan kendaraan di Kota Batam. Hal ini terjadi tidak hanya dalam pajak kendaraan saja, tapi pajak yang lainnya juga mengalami hal serupa, imbas dari terpuruknya ekonomi global karena pandemi ini.

3. Penerimaan

Berdasarkan pertanyaan dari penulis tentang berapa target PKB dan BBN-KB maka dapat diketahui bahwa penerimaannya yakni PKB Rp 378.582.834.754,00. Dan jumlah keseluruhan dari penerimaan BBN-KB Rp 200.657.895.300,00.

Menurut penulis pengaruh adanya pandemi ini membuat realisasi penerimaan target menurun. Hal ini dikarenakan banyak tunggakan yang dilakukan oleh pemilik kendaraan khususnya. Mereka menerima pajak pokoknya saja dan menghapus denda keterlambatan pembayaran pajak.

3.3.3 Poin-poin yang akan dibahas / ditanyakan kepada nara sumber :

1. Berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak :
 - a) Apakah yang menjadi dasar kepatuhan wajib pajak?
 - b) Bagaimana agar masyarakat patuh dengan pajak kendaraannya?
 - c) Bagaimana mengatasi penunggakan tersebut?
2. Penerimaan pajak sebelum dan saat pandemi :
 - a) Berapakah penerimaan kendaraan baru se-Kepulauan Riau tahun 2019-2020?

- b) Berapakah target masing-masing KUPTD se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020?
 - c) Berapakah target yang di capai saat pandemi ini?
3. Strategi dan kebijakan pemerintah sebelum dan selama pandemi Covid-19 :
- a) Kebijakan apa yang di ambil untuk menertibkan penunggak pajak?
 - b) Bagaimana menyikapi penunggak pajak disaat social distancing ini?
 - c) Hal apa yang ditempuh untuk mencapai target penerimaan pajak tersebut?

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data langsung dilakukan saat data dikumpulkan yaitu dengan reduksi data, pemaparan data, dan penyimpulan data. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Neuman (Sofia : 44), tujuan utama dari penelitian deskriptif yakni bagaimana penggunaan kata-kata dan pemaparan angka dapat menggambarkan dan menyajikan profil, permasalahan, pengklasifikasian, serta garis besar setidaknya untuk menjawab pertanyaan 5W+1H.